

**PERJANJIAN PRA-NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM DAN HUKUM POSTIF DI INDONESIA  
(Studi Kasus KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**FAYZA MIFTACH FAUZIA RISANTO**

**C100160051**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMDIYAH SURAKARTA  
2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERJANJIAN PRA-NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM DAN HUKUM POSTIF DI INDONESIA  
(Studi Kasus KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

**oleh:**

**FAYZA MIFTACH FAUZIA RISANTO**

**C100160051**

**Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:**

**Dosen**

**Pembimbing**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Rizka', with a stylized flourish at the end.

**(Dr. Rizka, S.Ag., M.H)**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERJANJIAN PRA-NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM DAN HUKUM POSTIF DI INDONESIA  
(Studi Kasus KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta)**

**OLEH**

**FAYZA MIFTACH FAUZIA RISANTO**

**C 100 160 051**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Jum'at, 14 Agustus 2020  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji:**

1. Dr. Rizka, S.Ag., M.H (.....)  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Penguji II (.....)  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Penguji III (.....)  
(Anggota I I Dewan Penguji)

**Dekan,**



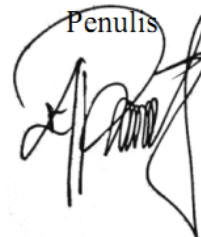
**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum**  
**NIK. 537/NIDN. 0727085803**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 14 Agustus 2020

Penulis  


**FAYZA MIFTACH FAUZIA RISANTO**

**C100160051**

**PERJANJIAN PRA-NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
DAN HUKUM POSTIF DI INDONESIA  
(Studi Kasus KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta)**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Postif Di Indonesia (Studi Kasus KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta) serta manfaat isi perjanjian pra nikah bagi calon pasangan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Metode pendekatan yang dipakai penulis adalah penelitian empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di KUA Banjarsari Kota Surakarta. Penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan, pengamatan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Pra-Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Postif di Indonesia (Studi Kasus KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta) hanya ada dua pasangan yang membuat perjanjian pra nikah, perjanjian tersebut berupa salinan akta yang dibuat oleh notaris dan sudah disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Isi dari perjanjian tersebut mengatur tentang pembagian harta sebelum dan sesudah terjadinya perkawinan yaitu antara lain kewajiban suami, pembagian harta ketika terjadi perceraian, pemeliharaan anak, mendirikan usaha, poligami dan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), pembagian harta warisan. Dalam perspektif hukum Islam keseluruhan perjanjian tersebut merupakan syarat yang tidak menyimpang dari Hukum Islam. Sehingga para pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut hukumnya wajib untuk memenuhi persyaratan. Sedangkan dari sisi Hukum Perkawinan di Indonesia, perjanjian tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Perjanjian tersebut juga memiliki kekuatan hukum yang sah, yang dicatat oleh akta notaris dan disahkan pegawai pencatat perkawinan.

**Kata Kunci:** perjanjian pra nikah, hukum islam, hukum perkawinan indonesia

**Abstract**

This study aims to determine the Pre-Marriage Agreement in the Perspective of Islamic Law and Positive Law in Indonesia (KUA Case Study in Banjarsari District, Surakarta City) and the benefits of the contents of the pre-marital agreement for prospective couples in realizing a confident family. The method used by the author is empirical research with the nature of descriptive research. The research location is KUA Banjarsari, Surakarta City. The author uses primary and secondary data sources. The method of collecting data in this study uses the method of collecting literature, observations and interviews. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the Pre-Marriage Agreement in the Perspective of Islamic Law and Postive Law in Indonesia (KUA Case Study of Banjarsari Subdistrict, Surakarta City) there are only two couples who make a prenuptial agreement, the agreement in the form of a copy of the deed made by a notary and has been approved by the marriage registrar. The contents of the agreement regulate the distribution of assets before and after marriage, which

includes husband's obligations, distribution of assets during a divorce, child care, establishing a business, polygamy and domestic violence, distribution of inheritance. In the perspective of Islamic law the entire agreement is a condition that does not deviate from Islamic Law. So that the parties involved in the agreement are legally obliged to fulfill the requirements. While in terms of Marriage Law in Indonesia, the agreement is in accordance with Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law. The agreement also has valid legal force, which is recorded by a notarial deed and legalized by the marriage registrar.

**Keywords:** prenuptial agreement, islamic law, indonesian marriage law

## 1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sebuah ikatan resmi dari dua insan manusia laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan sebagai suami istri yang sah menurut hukum dan agama. Hukum Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram dan dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang. Untuk membangun cita-cita kehidupan berkeluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya berdasarkan pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi berkaitan juga dengan hukum Negara. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Hafiz & Chuzaimah. 1994).

Di Indonesia terdapat 3 (tiga) peraturan yang mengatur tentang perjanjian pra nikah atau disebut juga dengan perjanjian perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sejak berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), maka di Indonesia telah terjadi unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan, kecuali sepanjang yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka peraturan yang lama dapat digunakan (Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Secara spesifik perjanjian Pra Nikah atau

(*Prenuptial Agreement*) diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Hazairin, 1982).

Pada dasarnya perjanjian pra-nikah adalah sebuah perjanjian yang dibuat oleh calon mempelai sebelum mengadakan acara pernikahan untuk mengesahkan keduanya sebagai pasangan suami istri. Perjanjian pra nikah bersifat mengikat dan berlaku sejak pernikahan dilangsungkan yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan finansial bagi kedua belah pihak apabila terjadi pertikaian dalam rumah tangga yang berujung dengan perceraian, selain itu surat perjanjian pra nikah juga memiliki peran penting untuk melindungi aset dan properti selama pernikahan jika terjadi kebangkrutan atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Apalagi di era sekarang ini banyak pernikahan yang tidak mengedepankan nilai-nilai agama, kesusilaan, norma dan etika yang berlaku di masyarakat. Dimana rasa cinta dan kasih sayang sudah tidak lagi menjadi landasan yang utama dalam suatu pernikahan. Seringkali pernikahan hanya dijadikan sebagai kepentingan tertentu seperti jabatan, status, kekayaan dan lain sebagainya (Prawirohamidjojo, 1986). Apalagi di era sekarang ini banyak pernikahan yang tidak mengedepankan nilai-nilai agama, kesusilaan, norma dan etika yang berlaku di masyarakat. Dimana rasa cinta dan kasih sayang sudah tidak lagi menjadi landasan yang utama dalam suatu pernikahan. Seringkali pernikahan hanya dijadikan sebagai kepentingan tertentu seperti jabatan, status, kekayaan dan lain sebagainya (Ali, 1997).

Perjanjian Perkawinan (*Prenuptial Agreement*) adalah perjanjian yang dibuat antara calon suami istri sebelum pernikahan dilangsungkan dan isinya tidak boleh melanggar hukum, agama, dan norma-norma adat kesusilaan yang berlaku. Perjanjian tersebut dibuat dan disahkan oleh notaris atau pengacara kemudian dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan Catatan Sipil (Nasution, 2004).

Menikah sekali seumur hidup memang menjadi keinginan setiap pasangan sehingga sangat diperlukan persiapan dan kematangan sebelum menikah. Banyak hal yang perlu disiapkan, baik hal jasmani ataupun rohani, kondisi finansial dari masing-masing pasangan, serta persiapan akan pergantian status yang akan berubah. Banyak pasangan yang tidak siap akan hal tersebut sehingga menimbulkan putusnya hubungan pernikahan atau puncak dari perceraian yang mengakibatkan masalah-masalah yang timbul mengenai pembagian harta bersama

(harta yang diperoleh suami istri saat pernikahan berlangsung) dan mengenai hak asuh anak. Dalam kasus perceraian banyak pasangan yang memperlmasalahkan akan pembagian harta bersama dan perebutan hak asuh anak sehingga mengakibatkan hubungan antar suami istri yang tidak baik dan memperlambat proses perceraian yang akan berlangsung.

Perjanjian Pra Nikah masih dianggap hal yang tabu oleh sebagian masyarakat Indonesia. Banyak pro dan kontra mengenai perjanjian tersebut, banyak yang berpendapat bahwa pernikahan didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang oleh dua insan yang didalamnya tidak lagi mengenal pembagian harta dan harta tersebut telah menjadi hak milik bersama, pendapat lain juga mengatakan bahwa perjanjian pra nikah dibuat untuk menyiapkan perceraian. Terlepas dari kepercayaan orang masing-masing, perjanjian pra nikah lebih ditekankan kepada perlindungan hukum dan untuk melindungi setiap pasangan dari tuntutan yang mungkin akan timbul ketika terjadi perceraian antara suami dan istri atau terjadi perpisahan akibat kematian.

Sejak dibuatnya perjanjian pra nikah maka timbulah hubungan hukum antara suami dan istri. Hubungan hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan istri yang harus ditaati. Hak dan kewajiban antara suami dan istri terhadap masalah kekayaan diatur dalam Bab VI Pasal 119 sampai dengan Pasal 123 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengaturan benda dalam perkawinan juga diatur dalam Bab VII Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu : (1) Bagaimana perjanjian pra nikah di KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta menurut prespektif hukum islam dan hukum positif? dan (2) Bagaimana manfaat isi perjanjian pra nikah bagi calon pasangan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah?

Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk dan isi perjanjian Pra Nikah yang ada di KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta menurut perspekif hukum Islam dan hukum positif dan (2) Untuk



mengetahui manfaat isi perjanjian pra nikah bagi calon pasangan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah.

Manfaat penelitian ini adalah : (1) Manfaat Teoritis, yaitu (a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum terutama Hukum Islam dalam hal Perjanjian Pra Nikah di Indonesia, (b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan mengenai peran pentingnya Perjanjian Pra Nikah pada setiap calon pasangan suami istri yang hendak melakukan pernikahan, (c) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai literasi maupun referensi yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. (2) Manfaat Praktis, yaitu (a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai Perjanjian Pra Nikah di KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, (b) Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan pembaca mengenai gambaran Perjanjian Pra Nikah, tindakan hukum yang terjadi dalam hal Perjanjian Pra Nikah yang dibuat oleh calon pasangan suami istri di KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.

## **2. METODE**

Metode Penelitian, yaitu suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil dari wawancara dan data sekunder yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, wawancara dan pengamatan, kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan metode berpikir deduktif.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Bentuk Dan Isi Perjanjian Pra Nikah Di KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif**

Perjanjian pra nikah adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat

perkawinan terhadap harta benda mereka dan apa saja selama perjanjian tersebut tidak melanggar hukum, agama, dan kesusilaan (Istiqamah, 2011).

Perjanjian pra nikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia (studi kasus KUA Banjarsari Kota Surakarta) baru ada dua pasangan yang membuat perjanjian pra nikah, perjanjian tersebut berupa salinan akta yang dibuat oleh notaris dan sudah disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Isi dari perjanjian tersebut mengatur tentang pembagian harta sebelum dan sesudah terjadinya perkawinan, kewajiban suami, pembagian harta ketika terjadi perceraian, pemeliharaan anak, mendirikan usaha, poligami dan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), pembagian harta warisan.

Dalam perspektif hukum Islam keseluruhan perjanjian tersebut merupakan syarat yang tidak menyimpang dari Hukum Islam. Sehingga para pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut hukumnya wajib untuk memenuhi persyaratan. Sedangkan dari sisi Hukum Perkawinan di Indonesia, perjanjian tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Perjanjian tersebut juga memiliki kekuatan hukum yang sah, yang dicatat oleh akta notaris dan disahkan pegawai pencatat perkawinan. Berikut adalah analisis perjanjian pra nikah dari hasil penelitian di KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia:

#### 3.1.1 Pembagian Harta

Di dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, mengenai harta bawaan atau harta bersama telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 36, bahwa dimana mengenai harta bersama dan harta bawaan masing-masing suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dan mempunyai hak sepenuhnya melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Dan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 47, yang membolehkan adanya perjanjian pra nikah yang mana isinya dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Islam, maka isi perjanjian itu diperbolehkan menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ketetapan hipotik atas harta bersama atau harta syarikat. Dan pada Pasal 85 KHI dijelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada

percampuran harta suami dan harta istri dalam perkawinan, harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami.

Islam memberikan peraturan secara umum dalam menyelesaikan masalah bersama. Pembagian harta gono-gini tergantung pada kesepakatan bersama antara suami dan istri. Kesepakatan ini dalam Al Qur'an disebut dengan istilah "*Ash Shulhu*" yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suami istri). Hal tersebut diperkuat dengan firman Allah dalam Qur'an surat An-Nisa' ayat 128. Serta dalam pelaksanaannya perjanjian tersebut wajib hukumnya untuk ditaati, hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

*"Syarat yang paling berhak untuk ditunaikan adalah persyaratan yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan (para wanita)".*

Menurut pendapat Sayuti Thalib dalam bukunya Hukum Kekeluargaan di Indonesia mengatakan bahwa : "harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan". Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau atas usaha sendiri-sendiri selama masa perkawinan. Dalam yurisprudensi Peradilan Agama juga dijelaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan (Manan, 2006).

### 3.1.2 Kewajiban Suami

Dalam hukum perkawinan tentang kewajiban suami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 1 bahwa suami wajib melindungi istri dan keluarganya, yaitu memberikan rasa aman dan nyaman, dan istri wajib mengurus urusan rumah tangga sebaik mungkin. Jika keduanya melakukan sesuatu yang akibatnya melalaikan kewajibannya maka baik istri atau suaminya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 2 yang mana mengatur kewajiban suami bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Menurut pendapat ahli Sayyid Sabiq dalam kitab fikih sunnah kewajiban suami di dalam perkawinan menyatakan adalah : (1) memberikan nafkah kepada istri. (2) berlaku adil terhadap semua istri bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu (Sabiq, 2003).

### 3.1.3 Pembagian Harta Ketika Terjadi Perceraian

Dalam hukum perkawinan di Indonesia mengenai harta gono-gini dalam perceraian telah diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan, apabila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing, dalam hal tersebut maka apabila dalam pasangan yang membuat perjanjian pra nikah bercerai maka pembagian harta sudah ditentukan dalam perjanjian pra nikah.

Sedangkan dalam hukum islam pembagian harta gono-gini tergantung pada kesepakatan antara suami dan istri. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya kesepakatan ini didalam Al Qur'an disebut dengan istilah "*Ash Shulhu*" yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suami istri) setelah mereka berselisih, hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam QS An-Nisa ayat 128 yang artinya

*"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)".*

Menurut pendapat Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami dan istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya (Hadikusuma, 1990).

### 3.1.4 Pemeliharaan Anak

Bertumpu pada Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2012, tentang mendidik anak juga diatur dalam Pasal 45 UUP ayat 1 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Maka dari itu syarat yang terdapat dalam pasal 9 diatas selain tidak

bertentangan dengan hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia juga merupakan syarat yang wajib dipenuhi kedua belah pihak dan apabila ada yang mengingkari maka pihak tersebut akan berdosa.

Dalam hukum Islam memelihara dan mendidik anak dengan baik merupakan syarat yang wajib dipenuhi karena langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam perkawinan, sebagaimana dalam sabda Rasulullah yang artinya *“Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik”*.(HR Al Hakim : 7679) dimana dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa kedua orangtua wajib memberikan pendidikan yang baik untuk anaknya.

Menurut Amir Syariffudin dalam buku Hukum Perkawinan Di Indonesia menyatakan bahwa mencakup beberapa hal diantaranya perihal siapa yang lebih berhak terhadap pengasuhan anak dan siapa pula yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak hingga anak tersebut mampu berdiri sendiri (Syarifuddin, 2006).

#### 3.1.5 Mendirikan Usaha

Di dalam hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak Dan Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perjanjian pra nikah isinya boleh menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Didalam hukum Islam sama halnya dengan perjanjian yang mengatur tentang harta bersama yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam sabda Rasulullah saw yang artinya

*“Perdamaian adalah boleh diantara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan perdamaian yang menghalalkan yang haram”*(HR At-Tirmidzi)

Menurut pendapat Agus Budiarto dalam bukunya yang berjudul Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas menyatakan bahwa hal yang demikian tidak mengandung masalah sepanjang aturan-aturan mengenai badan hukum suatu usaha dipenuhi oleh karena itu mempunyai hak dan

kewajiban sendiri yang terlepas dari para pendiri dan para pemegang sahamnya (Budiarto, 2009).

#### 3.1.6 Tentang Poligami dan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Poligami di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (PP No.9 Tahun 1975) dan pada dasarnya asas yang melekat dalam undang-undang perkawinan tersebut merupakan asas monogami. Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975, dapat dirumuskan bahwa seorang suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang (berpoligami), haruslah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perumusan tentang kejahatan perkawinan diatur dalam Pasal 279.

Dalam Islam sendiri suami istri diwajibkan agar bergaul dengan baik, supaya dapat tercipta kehidupan yang harmonis dan damai, wajib bagi suami istri untuk saling mempergauli pasangannya dengan baik, sebagaimana firman Allah dalam Qur'an Surat An-Nisa ayat 19 yang artinya

*“Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut”.*

#### 3.1.7 Pembagian Harta Warisan

Dalam hukum di Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 852 tentang penetapan pembagian harta warisan bila orang meninggal dunia tidak membuat testment, yang pertama berhak mendapat warisan yaitu suami atau istri dan anak-anak, masing-masing berhak mendapat bagian yang sama jumlahnya, tetapi apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut diatas maka yang kemudian berhak mendapat warisan adalah orang tua dan saudara dari orang tua yang meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa orang tua masing-masing sekurang-kurangnya mendapat seperempat dari warisan. Begitu juga didalam Islam apabila suami istri meninggal maka hartanya jatuh kepada anak-anak yang ditinggalkan dari hasil perkawinan, sedangkan apabila tidak ada anak maka ahli warisnya adalah keluarga dari

masing-masing pihak suami istri. Dalam hal waris dalam hukum Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 dan 12

Menurut Abu Zahrah dalam karyanya Usul al-Fiqh beliau menegaskan bahwa hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan ahli warisnya yang meninggal dunia termasuk ke dalam kategori hak hamba atau hak perorangan secara murni. Beliau menyejajarkan hak untuk mewarisi dengan hak untuk menagih atau menerima piutang dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan pemilik harta. Setelah menegaskan bahwa hak mewarisi adalah hak hamba secara murni, Abu Zahrah menjelaskan lebih lanjut bahwa : “Melanggar hak hamba adalah sebuah kezaliman, Allah tidak menerima obat seseorang yang memakan hak hamba, kecuali jika yang bersangkutan membayar hak itu kepada pemiliknya atau digugurkan oleh pemilik atau memaafkannya. Hak semacam ini tidak lain adalah untuk memelihara kemaslahatan perorangan. Oleh karena itu, hak seperti ini bisa digugurkan oleh pemilik hak (Zein, 2004).”

### **3.2 Manfaat Isi Perjanjian Pra Nikah Bagi Calon Pasangan Dalam Mewujudkan Keluarga Yang Sakinah**

Pada dasarnya perjanjian pra nikah tidaklah seburuk yang menjadi anggapan masyarakat. Hal ini terjadi karena perjanjian pra nikah bagi orang kebanyakan adalah kurang etis tidak sesuai dengan budaya orang timur. Mengingat pentingnya perjanjian pra nikah ternyata cukup banyak manfaat bagi calon pasangan suami istri. Karena itu manfaat dari perjanjian pra nikah adalah dapat mengatur penyelesaian dari masalah yang kira-kira akan timbul selama perkawinan, antara lain: Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan tidak bercampur. Jika salah satu pihak suami atau istri sebelumnya pernah menikah maka perjanjian pra nikah ini sangatlah penting karena jika tidak dibuat perjanjian maka mempelai kedua tersebut akan memiliki atau memperoleh sebagian dari seluruh harta peninggalannya. Dan apabila terjadi perceraian harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta bersama atau harta gono-gini.

Melindungi kepentingan pribadi jika pasangan melakukan poligami. Meskipun Pasal 65 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mewajibkan suami yang berpoligami untuk menjamin kehidupan semua istrinya

dan harta bersama masing-masing perkawinan terpisah, namun itu tidak cukup menjamin kepentingan atas harta bersama maupun kewajiban suami jika terjadi perceraian. Oleh karena itu perjanjian pra nikah dapat memastikan harta bersama dalam perkawinan masing-masing akan terlindungi, dan tidak tercampur dengan perkawinan yang lain serta perjanjian pra nikah dapat memastikan pemisahan harta peninggalan, baik untuk perkawinan yang pertama, kedua, ketiga bahkan perkawinan yang keempat. Masing-masing istri akan tenang dan hidup terjamin jauh dari pertikaian dan perselisihan antar ahli waris.

Tentang pemisahan hutang, dalam perjanjian pra nikah dapat diatur mengenai masalah hutang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa hutang. Hutang yang dimaksud adalah hutang yang terjadi sebelum pernikahan, selama pernikahan, setelah perceraian, bahkan kematian.

Menjamin kepentingan usaha. Apabila memiliki usaha bisnis yang dijalankan pasangan berhak menikmati keuntungan bahkan dari usaha bisnis yang dapat dianggap sebagai harta bersama perkawinan yang bila terjadi perceraian kekayaan atas usaha bisnisnya harus dibagi termasuk soal keuntungan harta atau bertambahnya harta kekayaan kedua belah pihak yang timbul dari hasil harta kekayaan masing-masing. Dengan adanya perjanjian pra nikah dapat mengatur apabila terjadi perceraian atau pernikahan berakhir, masing-masing pihak bisa melanjutkan berbisnis atau bermitra dan sebaliknya sesuai kesepakatan yang dibuat.

Menjamin berlangsungnya harta peninggalan. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pada perjanjian pra nikah dapat memastikan bahwa tidak akan hadiah atau warisan berpindah dan menjamin harta perolehan dari warisan atau hadiah tetap dalam penguasaan masing-masing.

Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut terutama mengenai masalah biaya hidup anak, dan biaya pendidikannya harus diatur sedemikian rupa berapa besar kontribusi masing-masing orang tua, dalam hal ini tujuannya agar kesejahteraan anak-anak tetap terjamin. Jadi, jika terjadi perceraian dapat mengajukan perjanjian pra nikah tersebut dan meminta kepada hakim



untuk memerintahkan suami menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian pra nikah.

## **4 PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

*Pertama*, Isi perjanjian pra nikah yang terdapat di KUA Banjarsari Kota Surakarta antara lain : mengatur tentang pembagian harta sebelum dan sesudah terjadinya perkawinan, kewajiban suami, pembagian harta ketika terjadi perceraian, pemeliharaan anak, mendirikan usaha, poligami dan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), pembagian harta warisan.

*Kedua* Menurut perspektif Hukum Islam isi perjanjian pra nikah yang terdapat pada KUA Banjarsari Kota Surakarta tidak ada yang menyimpang dari Hukum Islam. Eksistensi perjanjian pra nikah dalam Hukum Islam adalah diperbolehkan selama substansi dari perjanjian tersebut tidak merugikan salah satu pihak dan sesuai dengan syariat agama. Sedangkan menurut perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI) isi perjanjian pra nikah yang terdapat pada KUA Banjarsari Kota Surakarta tidak ada yang menyimpang dari hukum positif di Indonesia, perjanjian pra nikah sangat dibutuhkan sebagai bentuk kejelasan secara tertulis mengenai batasan-batasan harta ataupun hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh masing-masing calon suami istri yang akan membuat. Perjanjian pra nikah bukanlah suatu sarana untuk mempermainkan tujuan suci dari perkawinan itu sendiri melainkan perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

### **4.1 Saran**

Adapun saran yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut: *Pertama*, pembuatan perjanjian pra nikah harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dalam hukum Islam. *Kedua*, perlu diadakannya sosialisasi mengenai perjanjian pra nikah kepada calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan. Dalam sosialisasi tersebut dijabarkan sisi-sisi positif atau manfaat dari membuat sebuah perjanjian pra nikah yaitu sebagai pelindung

hak dan kedudukan masing-masing pihak dari kesewenang-wenangan pihak lain dalam kehidupan berumah tangga, bukan sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap calon pasangan. Dengan diadakan sosialisasi tersebut diharapkan dapat bertujuan untuk menghilangkan stigma negatif yang melekat pada masyarakat kebanyakan tentang perjanjian pra nikah. Sehingga Dengan adanya perjanjian pra nikah akan lebih membantu suami dan istri dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka akan kewajiban dan hak masing-masing pihak yang terlibat. Dengan adanya perjanjian pra nikah ini diharapkan sebagai bentuk antisipasi untuk meminimalisir konflik atau permasalahan yang terjadi ke depannya karena telah jelas kedudukan hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali. (1997). *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Amir, Syarifuddin. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana: Prenada Media
- As-sayyid, Sabiq. (2003). *Fiqh as-Sunnah* Jilid II, Kairo: Dar al-Fath li Al-I'lam
- Budiarto, Agus. (2009), *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendirian Perseroan Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia
- Effendi, M. Zein Satria. (2004). *Problematika Hukum Kekeluargaan Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)*, Jakarta: Kencana
- Hadikusuma, Hilman. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Mondar Maju
- Hafiz Anshary, & Yanggo T.Chuzaimah. (1994). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Hazairin, Saleh k.Watjik. (1982). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Istiqamah. (2011). *Hukum Perdata di Indonesia*, Makassar: Alaudin Press
- Manan, Abdul. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta:Kencana
- Nasution, Khoirudi. (2004). *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*. Yogyakarta: Acedemia dan Tazzafa

Prawirohamidjojo Soetojo, R., Tjitro Soebijono. (1986). *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press